

EFEK RATCHETING DALAM ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH

Lilis Marlina

Universitas Teuku Umar - Meulaboh

Abstract: *One pervasive aspect of target setting is the ratcheting effect that happens when targets for the current year are influenced by the difference between last year's performance and its target. Lee and Plummer (2007) documented ratchet effect in public sector budgeting on performance based budgeting implementation. This study aims to find whether ratchet effect occur in expenditure budgeting. The population used in this study is 23 local government district/urban in the Aceh Province with the observation period of 5 years (2010-2014). Simple Linear Regresion was used to test the hypotheses. The The result shows that ratchet effect occurs in expenditure budgeting,*

Keywords: *ratcheting effect, budgeting and expenditure goverment.*

Abstrak: *Salah satu aspek yang meresap dalam pengaturan target adalah efek ratcheting yang terjadi ketika target untuk tahun berjalan dipengaruhi oleh perbedaan antara kinerja tahun lalu dan targetnya. Lee dan Plummer (2007) mendokumentasikan terjadinya efek ratchet pada penganggaran sektor publik dalam implementasi model penganggaran berbasis kinerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya efek ratchet dalam anggaran belanja daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 23 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Model regresi lineier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitain membuktikan bahwa terjadi efek ratcheting dalam anggaran belanja daerah.*

Kata kunci: *efek ratcheting, anggaran, dan belanja daerah .*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, yang mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan dana yang cukup dalam anggaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik (Mutiah, 2015), sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 sebagai penjabaran dari UU Nomor 32 Tahun 1999. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan arah kebijakan umum(AKU) dan prioritas anggaran sebagai *guidance* dalam pengalokasian sumberdaya dalam APBD (Abdullah dan Halim, 2006).

Menurut Key (1940, p.1144) pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik karena keterbatasan sumber daya. Key mengusulkan bahwa solusi atas permasalahan tersebut bisa ditemukan melalui pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan kelembagaan di mana keputusan alokasi sumber daya dibuat, yang akan dimulai melalui analisis yang cermat dan komprehensif dari proses penganggaran (Fozzard, 2001).

Dalam proses penganggaran, Anggaran yang sudah ditetapkan membutuhkan penyesuaian atau direvisi selama tahun berjalan dalam rangka untuk memasukan perubahan prioritas dan menghadapi kejadian tak terduga dan munculnya surplus yang berasal dari tahun sebelumnya (Anessi-Pessina, et.al., 2012). Perubahan anggaran dapat terjadi karena meningkatnya anggaran penerimaan atau pengeluaran atau sebaliknya, dari perkiraan awal. Dalam proses penganggaran, perubahan anggaran merupakan hal yang lazim terjadi sekaligus menjadi faktor penting di pemerintah daerah (Forrester dan Mullins, 1992). *Rebudgeting* dibutuhkan untuk membuat anggaran lebih responsif terhadap kebutuhan anggaran partisipan dan untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan (Forrester dan Mullins, 1992).

Abdullah dan Ramadhani (2014) melakukan penelitian terhadap perubahan alokasi belanja dalam anggaran belanja daerah pada kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Mereka menemukan bahwa, sisa anggaran sebelumnya berpengaruh terhadap perubahan alokasi belanja. Hal ini bermakna bahwa sisa anggaran sebelumnya dan perubahan anggaran pada tahun lalu menjadi pertambahan dalam melakukan perubahan tahun anggaran berjalan. Perilaku penyusunan anggaran yang mengikuti pola atau besaran anggaran tahun sebelumnya disebut *budget ratcheting* (Lee dan Plummer, 2007).

Dengan kata lain, efek *ratcheting* pada proses penyusunan anggaran organisasi pemerintahan merupakan penjelasan atas pertumbuhan anggaran dari waktu ke waktu. Pertumbuhan anggaran dari waktu ke waktu kurang lebih sekedar mengikuti norma klasik, yaitu "realisasi anggaran tahun sebelumnya ditambah tingkat pertumbuhan tertentu" (Lee dan Plummer, 2007; Marlowe, 2009). Hal ini menghasilkan implikasi berupa kecenderungan untuk produksi berlebihan pada barang dan jasa publik, *effort reduction* dan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang tidak penting menjelang akhir tahun anggaran (Lee & Plummer, 2007).

Lebih lanjut, Herocowitz dan Strawczynski (2002) menjelaskan bahwa rasionalisasi alternatif efek *ratcheting* bisa didasarkan pada fungsi kesejahteraan di mana penganggaran dapat meningkatkan manfaat marginal dari belanja

terkait pada tingkat pertumbuhan. Dalam hal ini, dalam siklus amplitudo akan meningkatkan rata-rata optimal belanja dengan cara yang sama. Kemudian Herocowitz dan Strawezynski menemukan bukti bahwa adanya kenaikan yang berkepanjangan dalam rasio pengeluaran pemerintah di negara-negara OECD. Setelah 1974 sebagian dijelaskan oleh siklus *ratcheting* yang efek akumulasinya diperkirakan sebagai 2% PDB. Sedangkan Diehl (1985) menemukan bukti bahwa adanya efek *ratchet* yang meningkat terhadap belanja militer. Lee dan Plummer (2007) menemukan bahwa anggaran pemerintah untuk sekolah mengalami *ratchet*. Mereka menemukan bahwa kelebihan belanja tahun sebelumnya menyebabkan peningkatan belanja yang dianggarkan lebih besar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efek *ratcheting* dalam penganggaran belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan penjelasan mengenai belanja modal, kinerja keuangan daerah, dan *budget ratcheting*. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel independen yaitu kinerja keuangan dan *budget ratcheting* yang diprediksi mempengaruhi belanja modal.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Siklus penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum (KUA) APBD sebagai landasan penyusunan rancangan APBD kepada DPRD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan penyusunan anggaran bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD (Halim dan Susanto, 2018).

Efek *Ratcheting* Dalam Penyusunan Anggaran

Salah satu aspek yang meresap dalam pengaturan target adalah efek *ratcheting* yang terjadi ketika target untuk tahun berjalan dipengaruhi oleh perbedaan antara kinerja tahun lalu dan targetnya (Aranda, Arellano, dan Davila, 2010). "*Prinsip ratchet*" mengacu pada kecenderungan menggunakan kinerja saat ini sebagai kriteria dalam menentukan tujuan masa depan, dan juga mengacu pada kecenderungan kinerja standar meningkat setelah periode kinerja yang baik (Lee, 2013).

Weitzman (1980) menyatakan kinerja saat ini bertindak seperti roda gigi berlekuk dalam memperbaiki titik tolak untuk target periode berikutnya. Lee dan Plummer (2007) menemukan bahwa anggaran pemerintah untuk sekolah kabupaten mengalami *ratchet*. Mereka menemukan bahwa kelebihan belanja tahun sebelumnya menyebabkan peningkatan belanja yang dianggarkan lebih besar pada tahun berikutnya. Operasi prinsip *ratchet* tersebar luas dalam

perencanaan atau peraturan, mulai dari penentuan standar kerja bagi pekerja individu untuk memperbaiki anggaran atau kuota produksi yang lebih besar.

Varian yang menguntungkan dari kinerja tahun lalu dikaitkan dengan peningkatan target untuk tahun berjalan, sedangkan varian yang tidak menguntungkan terkait dengan penurunan target tahun depan. Efek ini konsisten dengan perubahan kinerja yang terkait dengan komponen permanen. Tujuan *ratcheting* adalah untuk mengurangi kesenjangan anggaran dan mempengaruhi biaya yang timbul dalam penganggaran partisipatif (Aranda, Arellano, dan Davila, 2010).

Adapun efek *ratchet* dalam penyusunan anggaran muncul dalam bentuk perilaku oportunistik eksekutif dengan memodifikasi realisasi anggaran tahun berjalan menjelang akhir tahun anggaran. Model keagenan analitis menyatakan bahwa superior/prinsipal dapat menggunakan kinerja subordinat/agen pada periode berjalan untuk memperbaharui keyakinan mengenai kinerja periode mendatang (Fisher et al., 2006 dalam Susanto dan Halim, 2018; Weitzman, 1980). Bentuk keyakinan tersebut tertuang dalam proses negosiasi pada anggaran periode mendatang (Fisher et al., 2006). Dengan adanya efek *ratchet*, anggaran pada periode mendatang akan sama dengan anggaran periode berjalan ditambah penyesuaian (efek *ratchet*) yang ditentukan berdasarkan selisih antara luaran aktual (realisasi) dibandingkan dengan anggaran pada periode berjalan (Aranda & Arellano, 2010; Fisher et al., 2006 dalam Susanto dan Halim, 2018; Lee & Plummer, 2007; Marlowe, 2009; Weitzman, 1980).

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Belanja daerah merupakan penggunaan sumberdaya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (Abdullah dan Juanita, 2016).

Pasal 36 Permendagri No. 13/2006 menyebutkan bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dikelompokkan menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja senantiasa menjadi proses yang alot dan dinamis. Kondisi sumberdaya yang terbatas dan kebutuhan yang tak ada batasnya menciptakan persaingan diantara agency (satuan kerja di pemerintahan). Berbagai strategi dilakukan untuk bisa mendapatkan jumlah alokasi sumberdaya yang sesuai dengan "keinginan" budget actors. Bahkan dalam perubahan anggaran (rebudgeting), penambahan alokasi belanja tetap terjadi (Abdullah & Rona, 2015). Belanja menjadi alat bagi politisi untuk menunjukkan keberpihakan mereka kepada publik (voters).

METODELOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Jumlah keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh adalah 23 pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Aceh. Populasi yang diteliti termasuk kecil, maka pengambilan sampel tidak dilakukan karena tidak dapat mewakili populasi dan nilai-nilai yang dihitung berdasarkan sampel tidak tepat sebagai perkiraan dari nilai-nilai populasi (Cooper dan Schinder; 114). Adapun periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak 2010-2014. Pada tahap selanjutnya 23 pemerintah kabupaten/kota Provinsi Aceh akan dikalikan dengan 5 tahun periode pengamatan (2010-2014) sehingga jumlah akhir yang diobservasi sebanyak 115 pengamatan penelitian.

Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (bebas dan variabel dependen (terikat).

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah efek *ratcheting* yang didefinisikan sebagai penentuan anggaran tahun berjalan dipengaruhi oleh perbedaan antara realisasi anggaran tahun lalu dan targetnya.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah anggaran belanja daerah. Anggaran belanja daerah merupakan anggaran belanja daerah yang terdapat dalam APBD Murni pada pemerintah kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2010-2014.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis pertumbuhan anggaran yang dikembangkan oleh Weitzman (1980):

$$B_t - B_{t-1} = \delta + \lambda (A_{t-1} - B_{t-1}) \quad (1)$$

Model pada persamaan (1) memiliki residual yang dapat menyebabkan heteroskedastik (Leone dan Rock, 2001). Untuk mengatasi gejala heteroskedastik, Lee dan Plummer (2007) mengembangkan model menjadi:

$$B_t - B_{t-1} / B_{t-1} = \delta / B_{t-1} + \lambda (A_{t-1} - B_{t-1}) / B_{t-1} \quad (2)$$

Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh varian anggaran belanja daerah periode sebelumnya terhadap anggaran belanja daerah periode berjalan. Dimana B_t adalah anggaran belanja daerah pada tahun berjalan, B_{t-1} adalah anggaran belanja daerah pada tahun sebelumnya. A_{t-1} adalah realisasi belanja daerah pada tahun sebelumnya. Koefisien λ merepresentasikan tingkat dimana anggaran belanja daerah menyesuaikan dengan varian anggaran belanja daerah tahun sebelumnya. Koefisien δ adalah konstanta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 22, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Mean	Std. Deviation	Variance
Bt - B _{t-1}	115	,1711	,17458	,030
A _{t-1} - B _{t-1}	115	-,0827	,04059	,002
Valid N (listwise)	115			

Sumber: Data Diolah

Hasil analisis statistik deskriptif yang tersaji pada tabel 1 memperlihatkan bahwa selama periode observasi, rata-rata anggaran Belanja Daerah setiap periode tumbuh sebesar 17,11% dengan standar deviasi sebesar 0,18. Sedangkan varian belanja daerah memiliki varian positif sebesar 0.030.

Hasil pengujian efek ratcheting dalam anggaran belanja daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2
Hasil Regresi model pertumbuhan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,172	,037		4,627	,000
A _{t-1} - B _{t-1}	,014	,405	,003	,035	,972

Sumber: Data Diolah

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien *ratcheting* dalam anggaran belanja daerah sebesar 0,014. Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan efek *ratcheting* dalam anggaran belanja daerah apabila $\lambda \neq 0$. Mengaju pada syarat tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi efek *ratcheting* dalam anggaran belanja daerah.

Penelitian ini konsisten dengan teori, Leone dan Rock (2001) yang menyatakan bahwa *ratcheting* terjadi ketika varian positif dalam kinerja dari anggaran yang menggiring pada perubahan yang lebih besar dalam anggaran tahun berikutnya dibandingkan perubahan yang berhubungan dengan anggaran varian negatif yang besarnya sama.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Lim (2011) yang menemukan bukti adanya *budget ratcheting* untuk 50 kota di AS. Secara khusus, anggaran pendapatan yang memiliki varian positif terkait dengan peningkatan anggaran pendapatan pada tahun berikutnya, sementara anggaran pendapatan yang memiliki varian negatif tidak terkait dengan peningkatan anggaran pendapatan di masa mendatang.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Lee & Plummer (2007) yang menganalisis hubungan antara varian anggaran belanja yang terlihat

overspending dengan kenaikan anggaran belanja tahun selanjutnya. Artinya, ada bias dalam penentuan target anggaran pemerintah daerah. Jones & Euske (1991) menyatakan bahwa bias dalam pengalokasian anggaran bersifat strategis/jangka panjang dan melibatkan budget actors pada level tertinggi. Menurut Larkey & Smith (1989), bias dalam peramalan pendapatan dan estimasi belanja selalu terjadi dalam proses penganggaran pada pemerintahan daerah. Smith & Bertozzi (1998) menyebutkan kalau agency selalu berupaya memaksimalkan anggarannya, sehingga berpengaruh pada besaran varian atau selisih anggaran dengan realisasinya. Sejalan dengan itu, Isaksen (2002) dan Abdullah (2012) memandang bahwa pada setiap tahapan penyusunan anggaran terdapat ruang terjadinya praktik korupsi.

Hasil penelitian ini mendukung anggapan bahwa terdapat masalah keagenan dalam penganggaran daerah, yang terlihat ketika pengusul anggaran dan pemberi persetujuan atas usulan anggaran tersebut memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang kemudian diakomodir dalam anggaran (moral hazard). Penerapan anggaran partisipatif pada perusahaan/bisnis, telah banyak memberikan bukti bahwa terjadi budget slack dalam proses penentuan target kinerja untuk tujuan pemberian kompensasi atau insentif (misalnya Brownell & McInnes, 1986).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menguji efek *ratcheting* dalam anggaran belanja daerah. Hasil analisis data menunjukkan bahwa koefisien ratchet bernilai positif yaitu 0,014. Nilai ini menunjukkan bahwa dalam penentuan anggaran belanja daerah terjadi efek *ratcheting*. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Lee & Plummer (2007) yang menganalisis hubungan antara varian anggaran belanja yang terlihat *overspending* dengan kenaikan anggaran belanja tahun selanjutnya. Artinya, ada bias dalam penentuan target anggaran pemerintah daerah.

Saran

Penelitian ini mengusulkan beberapa saran agar penelitian selanjutnya menggunakan lingkup penelitian yang lebih luas, baik lingkup cluster, regional, maupun tingkat nasional dan mengembangkan pengukuran variabel penelitian yang memiliki validitas lebih baik bagi tujuan keterbandingan amatan antar periode. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur bias perilaku penyusun anggaran dengan menggunakan metode campuran (mixed method) dan eksperimen untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai bias perilaku dalam penyusunan anggaran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, S. & Abdul H. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (2): 17-32

-
- Anessi-Pessina, Eugenio, Mariafrancesca, S., Ileana, S. (2012). Budgeting and Rebudgeting in Local Governmentss-Siamese Twins. **Public Administration Review** 72 (6): 875-884.
- Abdullah , S. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. **Disertasi (Tidak Dipublikasikan)**.Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Abdullah, S. & Ramadhan, F. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Daerah. **Skripsi Tidak Dipublikasikan**, Universitas Syiah Kuala.
- Abdullah, S. & Riza Rona. (2015). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal: Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. Makalah Dipresentasikan pada **Konferensi Ilmiah Akuntansi ke-II**, IAI Wilayah Jawa Timur, di Universitas Kanjuruhan Malang, 29-30 April 2015.
- Abdullah, S. & Afrah, J. (2016), Bukti empiris pengaruh budget ratcheting terhadap hubungan antara pendapatan sendiri dan belanja daerah pada kabupaten/kota di aceh, **Modus** 28(2), 185-201.
- Aranda, C. Arellano, J., Antonio D. (2010). Ratcheting effect and the role of relative target setting. **Working Papers**, University of Navarra, Spain.
- Brownell, Peter and Morris McInnes. (1986). Budgetary Participation, Motivation, and Managerial Performance. **The Accounting Review**, 61(4): 587-600.
- Diehl, Paul F. (1985). Trends In Military Allocations 1816: What Goes Up Does Not Always Come Down. **Armed Force & Society**, 12 (1): 134-144.
- Fozzard, A. (2001). TheBasic Budgeting Problem Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and their Implications for Pro-Poor Budgeting. **Working Paper** 147.
- Forrester, John P., \$ Daniel R. Mullin. (1992). Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. **Public Administration Review**, 52 (2): 467-473.
- Hercowitz, Zvi and Michel Strawczynski. (2002). Cyclical Ratcheting in Government Spending: Evidence from the OECD. **Working paper**. Bank of Israel. December.
- Isaksen, Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika & A.A.N.B. Dwirandra. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. **E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana**, 7(1): 79-92.

-
- Jones, L. R. & K. J. Euske. (1991). Strategic Misrepresentation in Budgeting. ***Journal of Public Administration Research and Theory***, 1(4): 437-460.
- Lee, T. M. & Plummer, E. (2007), Budget adjustments in response to spending variances: Evidence of ratcheting of local government expenditures, ***Journal of Management Accounting Research***, 19(1), 137-167.
- Larkey, Patrick D. & Richard A. Smith. (1989). Bias in the Formulation of Local Government Budget Problems. ***Policy Sciences***, 22(2): 123-166.
- Leone, A. & S. Rock. (2002). Empirical Tests of Budget Ratcheting and Its Effect on Managers' Discretionary Accrual Choices. ***Journal of Accounting and Economics***, 33: 43-67.
- Lim, Dongkuk. (2011). Budget Ratcheting and Agency problem. ***Dissertation***. The University of Texas at Dallas.
- Lee, Caroline. (2013). ***The Empirical Analysis of Target Ratcheting under Self-Evaluation***.
http://papers.ssrn.com/So13/papers.cfm?abstract_id=2359321.
- Marlowe, J, (2009), Budget variance, slack resources, and municipal expenditures, ***SSRN Library***.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Susanto, A. A., & Abdul Halim. (2018). Efek Roda Gigi Searah pada Penganggaran Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). ***Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik***, 1. Voorhees.
- Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. (1998). Principals and agents: An explanatory model for public budgeting. ***Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management***, 10(3): 325-353.
- Weitzman, M. L., (1980). The "Ratchet Principle" and performance incentives, ***The Bell Journal of Economics***, 11(1), 302-308.